



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS SOSIAL

Jalan Prof Moh. Yamin No. 15 Palu Telp. (0451) 421866 Fax. 421866
website : dinsos.sultengprov.go.id - e-mail : dinassosial.provsulteng@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 188.4/173/SK/ Peg. Umum / VIII / 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

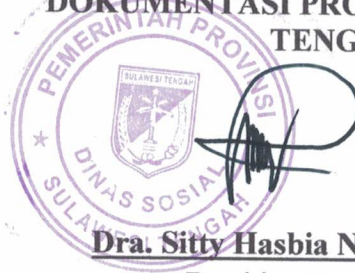
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Palu
Pada : 01 Agustus 2025
Tanggal

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dra. Sitty Hasbia N. Zaenong., M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19650824 199103 2 006

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/ UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA PENYIMPANAN/ JADWAL RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
					DOKUMEN	FILE	ONLINE		
1	IKU	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	Selama berlaku Perda/Pergub	Secara Berkala
2	Rencana Strategi (RENSTRA)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	Selama berlaku Perda/Pergub	Secara Berkala
3	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 tahun	Secara Berkala
4	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 tahun	Secara Berkala
5	Rencana Kerja (RENTJA)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 tahun	Secara Berkala
6	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 tahun	Secara Berkala
7	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 tahun	Secara Berkala
8	Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 tahun	Secara Berkala
9	Struktur Organisasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	Selama berlaku Perda/Pergub	Secara Berkala
10	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	6 bulan	Secara Berkala
11	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	1 tahun	Secara Berkala
12	Daftar Pejabat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	Selama berlaku SK Gubernur	Secara Berkala
13	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	Selama ASN yang bersangkutan berstatus ASN kecualli Pejabat JPT	Dikecualikan
14	Daftar Riwayat Hidup ASN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	Berlaku sesuai periode update riwayat kepegawaian	Secara Berkala
15	Daftar Usul proses administrasi kepegawaian ASN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	1 tahun atau sesuai kebutuhan	Secara Berkala

16	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
17	Surat Pemberitahuan Pajak Tahuan (SPPTH)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Secara Berkala
18	Laporan pengusulan cerai ASN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
19	Disposisi surat Pimpinan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
20	Nota dinas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
21	Usul penajutuhan sanksi disiplin ASN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
22	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	Sub Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
23	Surat Penawaran Harga pada dokumen pemenang lelang	Sub Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
24	Dokumen penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi)	Sub Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
25	Dokumen Data Aset	Sub Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
26	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
27	Neraca Keuangan	Sub Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
28	Realisasi Anggaran tahun sebelumnya	Sub Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
29	Permohonan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
30	Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
31	Pengumpulan Uang Atau Barang	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
32	Permohonan Bantuan UEP Keluarga Plasma	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
33	Permohonan Bantuan UEP LKS	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
34	Tata Kelola Logistik Bencana Alam	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan

35	Distribusi Barang Logistik Bencana (Buffer Stock) Tahap Pra Bencana	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
36	Distribusi Barang Logistik Bencana (Buffer Stock) Tahap Tanggap Darurat	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
37	Dapur Umum Lapangan/DUMLAP Tahap Tanggap Darurat	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
38	Pusat Pengendalian Operasional (PUSDLOPS) Bencana/Pos Koordinasi (POSKO) Bencana	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
39	Penanganan Orang Terlantar (OT)	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah sesuai kebutuhan	Dikecualikan
40	Bantuan Sosial Penyediaan Alat Bantu dalam Pantu dan Penjangkauan	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
41	Bantuan Sosial Penyediaan Permakanan Dalam Pantu	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
42	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Disabilitas	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
43	Unit Pelayanan Sosial Keliling	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
44	Bantuan Sosial Bahan Makanan Anak/Gizi	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
45	Sidang Tim Pertimbangan dan Izin Pengangkatan Anak Daerah	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
46	Kegiatan Day Care Lanjut Usia	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
47	Bantuan Sosial Bahan Makanan Lanjut Usia/Gizi	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
48	Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bidang Penanganan Fakir Miskin	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
49	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Bidang Penanganan Fakir Miskin	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan
50	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Pantu UPT, Pantu Sosial Anak	UPT Pantu Sosial Anak	Kepala UPT Pantu Sosial Anak	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun	Dikecualikan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DUMUMKAN SECARA BERKALA
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/ UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG			JANGKA PENYIMPANAN/ JADWAL RETENSI ARSIP
					DOKUMEN	FILE	ONLINE	
1	IKU	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	Selama berlaku
2	Rencana Strategi (RENSTRA)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	Selama berlaku Perda/Pergub
3	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 tahun
4	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 tahun
5	Rencana Kerja (RENJA)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 tahun
6	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 tahun
7	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 tahun
8	Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Ada	1 tahun
9	Struktur Organisasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	Selama berlaku Perda/Pergub
10	Daftar Urut Keangkatan (DUK)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	6 bulan
11	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	1 tahun
12	Daftar Pejabat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	Selama berlaku SK Gubernur
13	Daftar Riwayat Hidup ASN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	Berlaku sesuai periode update riwayat kepegawaian
14	Daftar Usul proses administrasi kepegawaian ASN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Ada	Tidak Ada	1 tahun atau sesuai kebutuhan
15	Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPTT)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2025	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 tahun

Pt. SEKRETARIS DINAS SOSIAL,
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Kiki Rezqi Ramdhanjari, S.STP., MM
Pencana

Nip. 19790727 199711 2 001

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIUMUMKAN SERTA MERTA
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT / UNIT / SATUAN KERJA YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG			JANGKA PENYIMPANAN/ JADWAL RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
					DOKUMEN	FILE	ONLINE		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pt. SEKRETARIS DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Kiki Rezi Ramdaniyarti, S.STP, MM
Pendina
Nip. 19790727 199711 2 001

LAMPIR P
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 188.71/133/SK/VIII/2025
TANGGAL : 01 Agustus 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DITUMBUHKAN SETIAP SAAT
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT / UNIT / SATUAN KERJA YANG MENGUJAI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG			JANGKA PENYIMPANAN/ JADWAL RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
					DOKUMEN	FILE	ONLINE		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pt. SEKRETARIS DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Kiki Reza Raindhaniasari, S.STP, MM
Pembina
Nip. 19790727 199711 2 001



PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Kepegawaian (arsip fisik/dokumen individu ASN)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h (data pribadi)	Privasi ASN terganggu, potensi penyalahgunaan identitas	Melindungi data pribadi & integritas ASN	Selama ASN aktif + 5 tahun setelah pensiun
2	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b (rahasia jabatan)	Timbul spekulasi, konflik internal	Menjamin objektivitas proses mutasi	Sampai keputusan mutasi ditetapkan
3	Laporan pengusulan cerai ASN	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h (informasi pribadi)	Privasi keluarga ASN terbuka	Melindungi martabat ASN & keluarga	Permanen
4	Disposisi surat pimpinan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a (proses internal)	Bocor strategi kebijakan	Menjamin kerahasiaan internal	Sampai keputusan final
5	Nota dinas	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Menimbulkan multitafsir	Menjaga efektivitas tata kelola	Sampai kebijakan selesai
6	Usul penjatuhan sanksi disiplin ASN	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Merugikan nama baik ASN	Menjamin due process & keadilan	Permanen
7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Risiko penyalahgunaan anggaran	Melindungi proses audit internal	Sampai audit selesai
8	Surat penawaran harga pada dokumen lelang	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Persaingan usaha tidak sehat	Menjamin fair competition	Sampai pemenang diumumkan
9	Dokumen penawaran pengadaan (data pribadi)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data pribadi rekanan terbuka	Melindungi privasi penyedia	Permanen
10	Dokumen Data ASN	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Potensi kebocoran NIK, alamat	Melindungi ASN	Permanen
11	Dokumen kelengkapan SPM	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Bocor transaksi keuangan	Melindungi proses pembayaran	Sampai realisasi selesai
12	Neraca Keuangan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Disalahgunakan pihak luar	Menjaga akuntabilitas internal	Sampai disahkan
13	Realisasi Anggaran tahun sebelumnya	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Bisa dipelintir sebelum audit	Menjaga objektivitas audit	Sampai laporan resmi
14	Permohonan Izin Operasional LKS	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data pribadi pengurus terbuka	Melindungi identitas pemohon	Sampai izin diterbitkan
15	Izin & Undian Gratis Berhadiah	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Potensi manipulasi undian	Menjamin transparansi internal	Sampai pengumuman resmi
16	Pengumpulan Uang/Barang	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Penyalahgunaan dana publik	Menjamin transparansi	Sampai audit selesai
17	Permohonan Bantuan UEP Plasma	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data pribadi keluarga terbuka	Melindungi privasi penerima	Permanen
18	Permohonan Bantuan UEP LKS	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data pribadi keluarga terbuka	Melindungi privasi penerima	Permanen
19	Tata Kelola Logistik Bencana	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Bisa menimbulkan kepanikan	Menjaga ketertiban	Sampai distribusi selesai
20	Distribusi Logistik Pra Bencana	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Disalahgunakan pihak luar	Menjaga keamanan stok	Sampai distribusi
21	Distribusi Logistik Tanggap Darurat	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Potensi chaos lapangan	Menjamin efektivitas bantuan	Sampai selesai
22	Dapur Umum Lapangan Darurat	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Data lokasi rawan bocor	Menjaga keamanan lokasi	Sampai tanggap darurat selesai
23	Pusdalops/Posko Bencana	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Lokasi rawan dieksploitasi	Menjaga keamanan posko	Selama darurat
24	Penanganan Orang Terlantar	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Identitas OT terbuka	Melindungi martabat OT	Permanen
25	Bansos Alat Bantu Panti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Identitas penerima terbuka	Melindungi privasi penerima	Permanen
26	Bansos Permakanan Panti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Sama di atas	Sama	Permanen
27	Bantuan Usaha Ekonomi Disabilitas	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data disabilitas terekspos	Melindungi penerima	Permanen
28	Unit Pelayanan Sosial Keliling	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Data layanan bocor	Menjaga efektivitas layanan	Sampai selesai
29	Bansos Bahan Makanan Anak	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Identitas anak terekspos	Melindungi anak	Permanen
30	Sidang Izin Pengangkatan Anak	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data anak & orang tua terbuka	Melindungi hak anak	Permanen
31	Kegiatan Day Care Lansia	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data kesehatan lansia terbuka	Melindungi lansia	Permanen
32	Bansos Lansia/ Gizi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data kesehatan lansia terbuka	Melindungi lansia	Permanen
33	Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data penerima terbuka	Melindungi penerima	Permanen
34	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data penerima terbuka	Melindungi penerima	Permanen
35	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Panti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data anak terekspos	Melindungi anak	Permanen
36	Rehabilitasi Sosial Gelandangan & Pengemis	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data pribadi terekspos	Melindungi penerima	Permanen
37	Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data lansia terekspos	Melindungi martabat lansia	Permanen

PIC. SEKRETARIS DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Kiki Rezqi Ramdani, S.STP, MM
Pembina
Nip. 19790727 199711 2 001